STUDI EVALUASI TENTANG EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR MELALUI PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA RETRIVAL KEPADA SISWA RAWAN DROP OUT (DO) TERUTAMA MISKIN DAN PEREMPUAN
(STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

Oleh
MUHAMMAD ALI GUNAWAN[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan efektivitas implementasi program pemerataan pendidikan dasar melalui program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out (DO) terutama miskin dan perempuan, mengkaji kelebihan dan kelemahannya, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengumpulan data di Dinas P dan K kabupaten Lombok Timur dan 16 (enam belas) sekolah jenjang pendidikan dasar (SD-MI dan SMP-MTs) penerima beasiswa retrival tahun 2007 yang diambil secara sensus. Penelitian ini bersifat *ex post facto*. Data tentang efektivitas implementasi program pemerataan pendidikan dasar melalui program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out (DO) terutama miskin dan perempuan ini diambil dengan menggunakan kuesioner, pedoman wawancara dan observasi yang diadopsi dari pedoman monitoring dan evaluasi proyek Desentralisasi Pendidikan Dasar (DBEP-ADB) kabupaten Lombok Timur.

Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif deskriptif untuk data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner sedangkan untuk data kualitatif (sekunder) yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan: 1) tingkat efektivitas implementasi program di dinas P dan K kab. Lombok Timur tergolong sangat efektif, sedangan dari 16 (enam belas) sekolah yang menjadi sasaran penelitian terdapat 2 (dua) sekolah yang tingkat efektivitasnya berada pada katagori "sangat efektif", dan 14 (Empat belas) sekolah tingkat efektivitasnya berada pada katagori "efektif". 2) Kelebihan program: a) meningkatnya kepedulian orang tua, guru, dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan; b) prosedur mudah dan jelas; c) terdapat indikasi yang kuat bahwa program mengurangi jumlah DO; d) kemungkinan adanya pemotongan atau penyelewengan dana dapat dikurangi. Sedangkan kelemahan program antara lain: a) terlalu banyak tim pelaksana; b) dana beasiswa yang tersedia/dianggarkan tidak mencukupi kebutuhan; c) pembagiannya dirasakan kurang adil, baik antar sekolah maupun antar siswa; d) kemungkinan terjadinya tumpang tindih antar program; e) peluang penyimpangan yang besar dalam penggunaan dana beasiswa; f) kurang mengakomodasi muatan lokal, yaitu perencanaan dan pelaksanaan secara partisipatif; g) lemahnya sistem pemantauan dan kontrol di tingkat paling bawah walaupun telah mengikutsertakan wakil masyarakat dan orang tua murid. 3) Kendala-kendala yang ditemukan: (a) lemahnya sistem pendataan, (b) kurang profesionalnya pengelola program di Dinas P dan K, (c) terbatasnya sarana informasi dan komunikasi dalam pengelolaan program, (d) pihak sekolah enggan

[1] Penulis adalah staf pengajar pada program studi pendidikan matematika fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Pekalongan (UNIKAL)

mencari/mendata siswa yang rawan drop out, dan (e) siswa yang drop out atau rawan drop out telah bekerja ke luar negeri menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia). 4) Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut adalah: a) pengelola program melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan instansi-instansi terkait; b) menyusun daftar pembagian tugas (*job description*) yang tegas dan jelas; c) mengupayakan adanya insentif bagi pihak sekolah; d) melakukan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pendidikan; e) belum ada upaya penanggulangan karena alasan ekonomi masyarakat yang belum stabil.

Kata Kunci: Studi Evaluatif, program pemerataan pendidikan dasar dan program pemberian beasiswa, beasiswa retrival, drop out, miskin dan perempuan

AN EVALUATIVE STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF EQUAL ACCESS TO PRIMARY EDUCATION PROGRAM THROUGH THE PROVISION OF RETRIEVAL SCHOLARSHIP TO STUDENT WITH THE HIGH LIKELIHOOD OF DROPPING OUT, PARTICULARLY, POOR AND FEMALE STUDENTS
(A STUDY IN EAST LOMBOK REGENCY)

By:
MUHAMMAD ALI GUNAWAN

ABSTRACT

This study aimed at finding out the effectiveness of the implementation of the equal access to primary education program through the provision of retrieval scholarship to students with the high likelihood of dropping out, particularly, poor and female students, investigating its strength and weakness, the constrains encountered in its implementation. To achieve the goal, the data were collected from the Office of Education of East Lombok Regency and 16 (sixteen) primary education level schools (SD-MI and SMP-MTs) whose students got the retrieval scholarship in 2007, drawn by census. This study was an ex-post facto study. The data on the effectiveness of the implementation of this program of equal access to primary education through the provision of the retrieval scholarship, particularly, poor and female students were collected by questionnaire, interview guide and observation adopted from monitoring and evaluation guidelines of the project of Decentralized Basic Education Project-Asian Development Bank (DBEP-ADB) of East Lombok Regency.

The data were analyzed descriptive-quantitatively for the primary data collected by questionnaire, qualitative data (secondary) collected by interview, observation, and documentation were analyzed by qualitative analysis. From the results it was found: 1) The effectiveness of implementation in the office of education East Lombok Regency was “very effective” while out of the 16 (sixteen) schools targeted, 2(two) schools were “very effective” category, and 14 (fourteen) were “effective”; 2) The strength of the program: a) in heightened the level of awareness of the parents, teachers, and society of the importance of education; b) the procedure was easy and clear; c) there was a strong indication that the program reduced dropouts; d) there was a likelihood of reduction in subtracting the amount of scholarship or corruption; 3) The weaknesses included: a) to many members of the executing committee; b) the amount of scholarship provided or allocated could not meet the need, c) unfairness in its distribution, both among and within the schools, d) the likelihood of inter-program overlaps, e) a high tendency of deviation in the use of scholarship, f) the program did not sufficiently accommodate local contents, i.e. participative planning and use, g) the weakness of monitoring and control system at the lowest level although it has engaged the representatives of the society and student’s parents; 4) The constraints encountered were: a) the weakness of the data encoding and processing system, b) the low level professionalism of the program management in the office of education, c) the limitation of information and communication facilities in managing the program, d) the schools hesitated to collect data of the students with

the high likelihood of dropping out, and e) the dropouts or the students with the high likelihood have worked overseas (Indonesia's human power). Effort conducted to overcome the constraint is: a) organizer of program co-ordinate and data synchronization with related/relevant institutions, b) compile list of is division of duty (job description) clear and coherent, c) strive the existence of incentive to school, d) conduct important hitting campaign and socialization of education, e) there is no effort to overcome because reason of society economics which not yet stabilized.
Key Words: Evaluative Study, Equal Access to Primary Education Program and Retrieval Scholarship Program, Dropouts, Poor and Female.

1. PENDAHULUAN

Salah satu ciri yang menonjol dari abad XXI adalah kompetisi yang ketat dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka yang unggul dalam kemampuan teknologi, manajemen, dan terutama kualitas sumber daya manusia (SDM) akan memainkan peranan penting dalam era tanpa batas ini. Sebaliknya, negara-negara yang terbelakang dalam tiga komponen tersebut akan terseok-seok, bahkan menjadi korban arus globalisasi. Dari tiga komponen itu, kualitas SDM merupakan faktor yang paling menentukan karena bersifat aktif. (Anam, 2005:375).

Berkualitasnya sumber daya manusia hanya dapat diraih melalui pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan, manusia mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan memperbaiki kualitas produksi mereka melalui investasi teknologi. Hal ini digambarkan oleh Carnevale (2001) berikut ini:

> *Education has become the key ingredient in the 21st century recipe for growing the economic pie. Human capital in the form of high levels of educational attainment is the collateral for successful technology investments. In modern economies, about 25 percent of increasing wealth and productivity improvements come from investments in technology; the other 75 percent come from increases in educational attainment and related advances in applied knowledge that allow us to use our technology investments effectively.*

Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak negara di dunia yang miskin sumber daya alam, tetapi mereka bisa memenangkan persaingan global karena memiliki SDM yang handal. Sebaliknya, tidak sedikit negara yang kaya potensi sumber daya alamnya, namun tidak dapat mengelola dengan baik karena SDM-nya lemah.

Pendidikan dengan demikian merupakan persoalan yang kompleks, banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti: faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Di antara sekian faktor tersebut, faktor ekonomi yang terwujud dalam biaya pendidikan merupakan faktor (komponen masukan) instrumental yang sangat penting dalam penyelengaraan pendidikan (di sekolah).

Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan–baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif—biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan. (Depdiknas, 2001:1).

Pengaruh nyata dari faktor ekonomi dapat dilihat dari merosotnya ekonomi di Indonesia yang ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda negeri ini sejak tahun 1997, menyebabkan penyelenggaraan pendidikan semakin terpuruk. Sebelum krisis ekonomi terjadi, pendidikan di Indonesia telah mencapai perkembangan yang luar biasa pada tiga dekade terakhir. Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan yang tajam terhadap angka buta huruf, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat, serta peningkatan APK/APM pada setiap tingkatan, rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja yang semakin tinggi ini telah membantu produktivitas diantara angkatan kerja. Data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dalam World Development Report menggambarkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat pendidikan dasar pada tahun 1997 mencapai 97%, meskipun proporsi anak yang menyelesaikan tingkat sekolah dasar tidak lebih dari 80%. (Anam, 2005:187)

Upaya untuk lebih mendorong jenjang pendidikan anak sekolah telah dilakukan dengan mencanangkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar DikDas) 9 tahun pada tahun 1994, yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2004. Sejak diperkenalkannya program tersebut, rasio partisipasi di tingkat SLTP telah meningkat setelah APM sempat menurun dari 62% pada tahun 1988 menjadi 58% pada tahun 1994, yang akhirnya meningkat menjadi 72% pada tahun 1997.

Dengan adanya krisis, terdapat kekhawatiran bahwa angka anak putus sekolah akan meningkat yang mungkin dapat membalikkan kondisi yang dicapai selama tahun-tahun sebelumnya. Lebih-lebih di daerah terpencil (IDT) dan daerah-daerah lainnya yang termasuk ke dalam kategori di bawah garis kemiskinan. Seperti: Irian Jaya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Lampung.

Dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan di Nusa Tenggara Barat, diperlihatkan dengan data banyaknya siswa yang putus sekolah (DO), yaitu dari 62.757 siswa sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri-swasta peserta ujian akhir nasional (UAN) tahun 2003/2004 di NTB, hanya 60.264 siswa yang benar-benar mengikuti ujian pada hari pelaksanaan. Sisanya, 2.493 siswa (umumnya siswi) gagal mengikuti ujian dengan alasan klasik: diterima bekerja sebagai tenaga kerja migran atau menikah menjelang hari "H" ujian.

Catatan lain, dari 300.980 penduduk buta huruf usia 10-14 tahun di NTB tahun 2004, hanya 47.820 orang di antaranya bisa dibelajarkan. Sisanya, 253.160 orang buta huruf dan 50 persen adalah perempuan, remaja, dan ibu rumah tangga. Kondisi pendidikan perempuan semakin parah mengingat angka putus sekolah SD pada kelas awal (kelas III dan IV) sebagian besar para siswi. (Kompas, Senin 07 Pebruari 2005).

Sementara itu, di kabupaten Lombok Timur angka putus sekolah (DO) di tingkat pendidikan dasar (SD-MI dan SLTP-MTs), pada tahun 2002/2003 mencapai 5,1% dari 204.783 orang siswa atau 10.239 orang. Dari jumlah tersebut, murid perempuan merupakan kelompok yang paling dominan (Depdikbud Lombok Timur, 2004).

Terpuruknya pendidikan di daerah ini, yang sebagian besarnya adalah perempuan, dikarenakan oleh faktor sosial masyarakat dan cara pandang mereka terhadap perempuan (gender) itu sendiri. Di mana perempuan Lombok menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks tidak hanya berhadapan dengan kuatnya ideologi patriarki dan ideologi familialisme yang mengakar dalam kultur masyarakat tetapi juga berhadapan dengan kapitalisme sebagai kekuatan baru ketika mereka masuk dalam wilayah publik (Abdullah, 2003: 8).

Melihat kondisi pendidikan yang begitu terpuruk di Lombok Timur sebagaimana yang diungkap di atas, pemerintah (pusat dan daerah) kemudian mengeluarkan beberapa program mendasar, salah satunya adalah program beasiswa, program tersebut antara lain dari Kementerian Depdiknas (APBN), Bank Pembangunan Asia (ADB), APBD propinsi hingga APBD Kabupaten dan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) (Suara NTB, 16-07-2004). Program ini ditujukan untuk mendukung biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin, serta bantuan dana operasional untuk sekolah-sekolah yang melayani mereka.

Program beasiswa tersebut beragam pula kriterianya, dari keluarga tidak mampu sampai beasiswa bagi kalangan keluarga yang tergolong mampu. Maka alasan untuk penerimaan beasiswa itu pun beragam pula. Siswa yang mampu secara ekonomi dan kebetulan cerdas di kelas, maka alasan pemberian beasiswa yakni penghargaan atas prestasinya. Di antara penerima beasiswa tersebut, kriteria kemiskinan dan jenis kelamin perempuan menjadi kriteria utama.

Khusus untuk program pemberian beasiswa yang dialokasikan melalui Proyek Desentralisasi Pendidikan Dasar (DBEP) ADB. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anak-anak yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan, gelandangan dan lain sejenisnya, anak-anak yang masuk dalam kategori ini akan dialokasikan melalui Dana Pengembangan Pendidikan Kabupaten (DPPK). Sedangkan anak-anak yang pernah mengenyam bangku

sekolah, namun karena alasan ekonomi, akhirnya mereka putus sekolah. Kategori anak yang kedua ini dialokasikan melalui Dana Pengembangan Sekolah (DPS). (Dirjen Dikdas, 2002)

Sejak program pemberian beasiswa ini berjalan sampai dengan sekarang, ternyata jumlah anak-anak yang putus sekolah tidak mengalami penurunan yang signifikan, bahkan ada kecenderungannya mengalami peningkatan. Hal ini tentu tidak terlepas dari sistem pengelolaan (pendataan, pendistribusian dan pertanggungjawaban serta praktek-praktek yang dijalankan) oleh pihak sekolah maupun pihak pengelola proyek kabupaten yang tidak memadai. Fenomena yang sering muncul dalam pelaksanaan program pemberian beasiswa adalah: Banyak siswa yang mampu secara ekonomi tiba-tiba mengaku miskin. Lebih parah lagi, oknum aparat di Kantor Desa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan miskin tersebut tidak memiliki kualifikasi yang jelas terhadap penerbitan surat keterangan dimaksud (Suara NTB, 16/07/2004). Di pihak sekolah sendiri, terdapat kekeliruan yang disengaja atau kesalahan yang terjadi karena kurangnya pemahaman pihak sekolah dengan komite sekolah mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran program. Banyak sekolah yang memberikan beasiswa DPS kepada semua siswanya secara merata. Bahkan, ada juga siswa yang tercantum dalam pendataan sebagai siswa atau anak yang layak mendapatkan beasiswa retrival namun yang bersangkutan sudah pergi ke Malaysia atau negara lainnya sebagai TKI.

Masalah lain juga muncul, yakni pada siswa penerima beasiswa itu sendiri, dengan tingkat ekonomi yang serba kekurangan, banyak orang tua atau siswa sendiri yang memanfaatkan uang beasiswa bukan untuk keperluan sekolah, tapi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (membeli sembako), digunakan untuk membiayai persalinan ibuknya yang sedang melahirkan, dan lain sebagainya.

Dengan munculnya masalah sebagaimana diutarakan di atas, bisa dikatakan bahwa program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan DO terutama miskin dan perempuan perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk pelaksanaannya di waktu mendatang dengan mekanisme yang lebih baik (*transparan akuntable*).

Dari uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1) Bagaimanakah efektifitas implementasi program pemerataan pendidikan dasar melalui pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out terutama miskin dan perempuan di kabupaten Lombok Timur ditinjau dari komponen konteks, input, proses dan produk?
2) Apakah kelebihan dan kelemahan program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out terutama miskin dan perempuan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar di kabupaten Lombok Timur?

3) Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur khususnya pengelola program dalam mengimplementasikan program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out terutama miskin dan perempuan?
4) Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur khususnya pengelola program untuk menanggulangi kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out terutama miskin dan perempuan?

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat efektivitas pelaksanaan program pemerataan pendidikan dasar melalui pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out (DO) terutama miskin dan perempuan sebagai berikut.

1) Efektikvitas implementasi program pemerataan pendidikan dasar melalui pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out terutama miskin dan perempuan dalam pemerataan kesempatan mengakses pendidikan dasar di kabupaten Lombok Timur ditinjau dari komponen konteks, input, proses dan produk.
2) Kelebihan dan kelemahan program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out terutama miskin dan perempuan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar di kabupaten Lombok Timur.
3) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur khususnya pengelola program dalam mengimplementasikan program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out terutama miskin dan perempuan.
4) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur khususnya pengelola program untuk menganggulangi kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out terutama miskin dan perempuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi.

1) Pihak Pemberi Dana (*Funding*) – DBEP: dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan program pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dasar, khususnya melalui program pemberian bantuan pembiayaan pendidikan, khususnya yang dialokasikan dalam bentuk beasiswa.
2) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten Lombok Timur: dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan dasar pertimbangan dalam

mengeluarkan kebijakan pendidikan, terutama dalam program peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di kabupaten Lombok Timur yang dialokasikan melalui program pemberian beasiswa.

3) Pihak sekolah penerima bantuan dana: dapat dijadikan sebagai bahan informasi pelaksanaan pemberian beasiswa di tingkat sekolah, serta dapat dijadikan sebagai instrumen sinkronisasi dan koreksi terhadap program kebijakan pemerintah dengan program kebijakan sekolah.
4) Masyarakat (Orang tua siswa) dan stakeholder lainnya: dapat dijadikan sebagai bahan informasi mengenai program pemberian beasiswa, dan sebagai alat penyadaran masyarakat tentang program-program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
5) Peneliti lainnya: dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam penulisan/penelitian berikutnya

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi *(evaluation research),* dengan mengambil salah satu model evaluasi, yaitu model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif deskriptif.

Pada penelitian ini sasaran yang diambil dalam evaluasi program Model CIPP adalah sebagai berikut.

1) Evaluasi konteks dengan sasaran; keadaan geografis daerah, permintaan masyarakat akan pendidikan di daerah, dukungan atau partisipasi masyarakat pada pendidikan di daerah, kebijaksanaan pemerintah, aspirasi masyarakat, dan status sosial ekonomi masyarakat.
2) Evalusi input dengan sasaran; visi misi pendidikan kabupaten Lombok Timur, tujuan pendidikan, sasaran pendidikan, program pendidikan, potensi sumber daya dinas pendidikan kabupaten Lombok Timur, karakteristik aparatur, penerapan dan pengembangan program pendidikan, dan sikap kemandirian dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Lombok Timur.
3) Evaluasi proses dengan sasaran; pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, evaluasi, kerjasama dan partisipasi, akuntabilitas, kemandirian, keterbukaan, dan keberlanjutan program.
4) Evaluasi produk dengan sasaran; keberhasilan program termasuk keunggulan dan kelemahan pelaksanaan program pemerataan pendidikan dasar di kabupaten Lombok Timur

Evaluasi program ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terhadap fenomena tertentu dalam hal ini mendeskripsikan pelaksanaan program pemerataan akses pendidikan dasar melalui program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan DO terutama miskin dan perempuan. Evaluasi program ini menggunakan model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam.

Populasi penelitian ini adalah semua pengelola program (penanggung jawab program, dewan pendidikan kabupaten, steering committee/pengarah proyek, tim MBS kabupaten, pengelola DBEP), siswa/masyarakat yang mendapatkan bantuan pendidikan/beasiswa retrival tahun 2007 yang tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan di kabupaten Lombok Timur. Kecamatan yang dimaksud adalah: Kecamatan Keruak, Pringgabaya, Pringgasela, Montong Gading, Wanasaba, Suela, Suralaga, Terara, dan Aikmel, Sembalun, Sambelia, Sikur, Sakra, Sakra Barat, Sukamulia, Selong, Sakra Timur, Masbagik, Labuhan Haji dan Jerowaru. Dengan jumlah penerima beasiswa sebanyak 400 orang siswa SD/MI dan 830 orang Siswa SMP/MTs. Sehingga jumlah populasi sebanyak 1.230 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Usman dan Setyadi (2000:191) *purpossive sampling* (teknik sampling bertujuan) digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Menurut Kerlinger (2002) sampling *purpossive* (bertujuan) tergolong sampling nonprobabilitas yang mempunyai ciri penilaian dan upaya cermat untuk memperoleh sampel representatif dengan cara meliputi wilayah-wilayah atau kelompok-kelompok yang diduga sebagai anggota sampelnya. Dalam penelitian ini purpossive dimaksudkan bahwa sampel penelitian sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan tujuan atau ciri penelitian yakni pengelola program dan sekolah/siswa penerima beasiswa retrival tahun 2006/2007 yang didanai melalui Dana Pengembangan Pendidikan Kabupaten (DPPK) Proyek Desentralisasi Pendidikan Dasar (DBEP) ADB kabupaten Lombok Timur, yang terdiri dari unsur: pimpinan proyek, penanggung jawab program, unsur dewan pendidikan, unsur tim MBS kabupaten, unsur tim satgas perencana pendidikan kabupaten, unsur tim steering committee, kepala desa/lurah, kepala sekolah, komite sekolah, masyarakat/orang tua siswa, dan siswa.

Dari jumlah siswa SD/MI sebanyak 400 orang dan Siswa SMP/MTs. Sebanyak 830 orang penerima beasiswa retrival, diambil 16 (enam belas) sekolah sebagai sampel yang mewakili setiap wilayah di Lombok Timur yaitu: SDN 3 Mamben Lauk, MI NS Wanasaba, SMPN 1 Wanasaba dan MTs NW Wanasaba Kecamatan Wanasaba, mewakili wilayah Utara (Suela, Pringgabaya, Sambelia, Aikmel dan Sembalun). Wilayah Selatan (Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak, Jerowaru) diwakili oleh kecamatan Sakra Barat yaitu: SDN 1 Gunung

Rajak, SMPN 1 Sakra Barat, MTs NW Sukarara, dan MTs NW Pengkelak Mas kecamatan. Wilayah Timur diwakili oleh kecamatan Labuhan Haji yang terdiri dari 4 sekolah yaitu: SDN 1 Korleko, SDN 2 Korleko, MTs NW Penede Gandor, dan MTs NW Suryawangi. Sedangkan wilayah Barat diwakili oleh kecamatan Masbagik yang terdiri: MTs NW Tanak Maik, MTs NW Kumbung, MTs Negeri Masbagik, dan SMPN 2 Masbagik.

Dari 16 (enam belas) sekolah yang dijadikan sebagai sampel sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 1 (satu) orang kepala sekolah, 1 (satu) orang komite sekolah, 3 (tiga) orang masyarakat (orang tua siswa), dan 3 (tiga) orang siswa.

Sedangkan unsur pengelola program terdiri dari: 1 (satu) orang pimpinan proyek, 1 (satu) orang penanggung jawab program, 1 (satu)) orang dewan pendidikan, 2 (dua) orang tim MBS kabupaten, 2 (dua) orang dari steering committee, 2 (dua) orang dari satgas perencana pendidikan kabupaten, dan 4 (empat) orang kepala desa/lurah.

Mengenai besarnya sampel, tidak ada aturan yang tegas mengenai berapa besarnya anggota sampel yang disyaratkan untuk penelitian (Husaini dan Akbar, 2000:191). Dalam penelitian ini pemilihan subjek dan besarnya sampel didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan: praktis (penghematan biaya, waktu, tenaga dan kemampuan), ketepatan (*key person* yaitu para juru kunci dalam implementasi program beasiswa retrival) dan untuk analisis data.

Data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sesuai dengan fokus penelitian, sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari *key informan* dan *informan*. Dalam penelitian ini, ditentukan pengelola program, kepala sekolah, dan komite sekolah sebagai *key informan*, sedangkan siswa, orang tua siswa, guru dan masyarakat sebagai *informan*. Penentuan sumber informasi dilakukan dengan *purposive*, yaitu berdasarkan tujuan penelitian, dan *snowball sample*, artinya informan yang telah diwawancarai diminta untuk menunjukkan informan berikutnya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu: 1) data primer (utama) yang berasal dari data kuantitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner, dan 2) data sekunder (data pelengkap) yaitu data kualitatif yang dikumpulkan dengan menggunakan: (a) metode observasi, (b) metode wawancara, dan (c) metode dokumentasi.

Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah: 1) kuesioner, 2) pedoman observasi, 3) pedoman wawancara, 4) *checklist*. Keempat instrumen ini digunakan secara bersama-sama untuk mengumpulkan data pada komponen konteks, input, proses dan produk. Masing-masing instrumen disesuaikan dengan aspek dan indikator yang diukur.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan jenis data yang terkumpul. Untuk data primer (data kuantitatif) dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dengan jalan masing-masing komponen diukur nilai pemusatannya.

Sedangkan data sekunder (data kualitatif) dianlisis dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1994).

Dalam menentukan efektivitas atau kinerja pelaksanaan program terhadap siswa sample yang diteliti didahului dengan menentukan nilai aspek yang dicari dengan rumus sebagai berikut.

$$Nas = \frac{\sum (Sik.Bik)}{\sum Bik}$$

(Depdiknas, 2002)

Dimana:
Nas = nilai aspek
Sik = skor indikator pendukung
Bik = bobot indikator

Selanjutnya dari nilai aspek-aspek yang diperoleh ditentukan nilai masing-masing komponen yang dicari dengan rumus:

$$Nk = \frac{\sum (Nas.Bas)}{\sum Bas}$$

(Depdiknas, 2002)

Dimana:
Nk = nilai komponen
Nas = nilai aspek
Bas = bobot aspek

Setelah mendapatkan nilai masing-masing komponen kemudian ditentukan nilai efektivitas program yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$Ne = \frac{\sum (Nk.Bk)}{\sum Bk}$$

(Depdiknas, 2002)

Dimana:
Ne = nilai efektivitas

Nk = nilai komponen
Bk = bobot komponen

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, tingkat efektivitas program di Dinas Pendidikan (P dan K) Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori sangat efektif, yaitu sebesar 4,40. Nilai efektivitas ini didukung oleh nilai komponen yang diukur seperti komponen konteks dengan nilai efektivitas sebesar 4,40, komponen input sebesar 4,03, komponen proses dan produk masing-masing sebesar 3,98 dan 3,97.

Sedangkan di tingkat sekolah, sekolah yang memiliki tingkat efektivitas sangat efektif sebanyak 2(dua) sekolah yaitu SMPN 2 Masbagik dan MI NS Wanasaba. Sedangkan sekolah lainnya termasuk ke dalam kategori efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut

Tabel: Ringkasan hasil perhitungan nilai aspek (NAS), nilai komponen (NK), dan nilai efektivitas

NO	NAMA INSTANSI/SEKOLAH	NILAI EFEKTIVITAS	
		Kuantitatif	Kualitatif
1	DINAS P DAN K	4.10	Sangat Efektif
2	MTs NW TANAK MAIK	3.53	Efektif
3	MTs NEGERI MASBAGIK	3.67	Efektif
4	MTs NW KUMBUNG	3.48	Efektif
5	SMPN 2 MASBAGIK	4.00	Efektif
6	SDN 1 KORLEKO	3.99	Efektif
7	MTs NW PENEDE GANDOR	3.50	Efektif
8	MTs NW SURYAWANGI	3.50	Efektif
9	SDN 2 KORLEKO	3.97	Efektif
10	SDN 1 GUNUNG RAJAK	3.98	Efektif
11	MTs NW SUKARARA	3.97	Efektif
12	SMPN 1 SAKRA BARAT	3.95	Efektif
13	MTs NW PENGKELAK MAS	3.54	Efektif

14	SDN 3 MAMBEN LAUK	3.97	Efektif
15	SMPN 1 WANASABA	3.82	Efektif
16	MI NS WANASABA	4.34	Sangat Efektif
17	MTs NW WANASABA	3.53	Efektif

Dalam penelitian yang dilaksanakan di Dinas P dan K, ditemukan adanya beberapa hal terkait dengan komponen konteks, input, proses dan produk pelaksanaan program pemerataan pendidikan dasar melalui program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out (DO) terutama miskin dan perempuan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Pada Komponen Konteks

Pada komponen konteks yang terdiri dari aspek: keadaan geografis, dukungan partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan status sosial ekonomi masyarakat. Ditemukan bahwa semua aspek tersebut termasuk ke dalam katagori baik, dalam artian semua aspek tersebut mendukung untuk diimplementasikannya program pemerataan pendidikan dasar melalui pemberian beasiswa retrival. Namun terdapat beberapa catatan khusus dalam aspek dukungan partisipasi masyarakat, di mana partisipasi masyarakat dirasakan belum maksimal, karena iklim komunikasi dan pergaulan yang terjalin antar pengelola program pendidikan di dinas P dan K dengan masyarakat dan internal pengelola program masih terdapat kesenjangan. Iklim komunikasi dan pergaulan yang terbentuk lebih cenderung kepada hubungan secara politik daripada hubungan kedinasan/kelembagaan, hal ini menjadikan masyarakat antipati dan kurang percaya kepada pengelola institusi pendidikan (dinas P dan K) terutama pada level pimpinan/pengambil kebijakan. Masyarakat dan sebagian besar pegawai di lingkungan dinas P dan K menilai bahwa selama periode 2004 sampai dengan 2008 kebijakan Bupati dirasakan tidak adil yang menempatkan seseorang pengambil kebijakan yang tidak profesional, seseorang bisa menjadi apa saja asalkan memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan kedekatan yang baik dengan pimpinan bukannya diukur dari kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki oleh seseorang atau daftar urut kepangkatan yang sudah ditetapkan.

2) Pada Komponen Input

Pada komponen input yang terdiri dari: visi dan misi dinas P dan K, tujuan program, sasaran program, sumber daya pengelola/pengelolaan program, siswa/sekolah penerima beasiswa. Ditemukan bahwa tujuan program, sasaran program sudah sesuai dengan visi dan

misi dinas P dan K. Akan tetapi, pada aspek tertentu seperti sumber daya pengelola/pengelolaan program dan siswa/sekolah penerima beasiswa terdapat masalah yang bisa dikatakan begitu serius seperti: tidak berkompetennya para pengelola program dari segi jumlah, kemampuan dan rasa tanggung jawab yang dimiliki. Contoh kasus: 1) dalam SK kepanitiaan sosialisasi dan narasumber penerimaan beasiswa retrival, SK kepanitiaan tersebut dinilai kurang tepat dikeluarkan oleh kepala dinas P dan K karena di dalam SK tersebut tercantum kepala BAPPEDA sebagai tim seleksi (kepala dinas memerintah kepala dinas), selain itu juga para anggota tim seleksi yang lainnya tidak terlibat, hal ini bisa jadi dapat menghambat pencapaian tujuan program dikarenakan siswa yang memperoleh beasiswa tidak diambil dari hasil pendataan yang dilakukan tetapi lebih cenderung subyektif. 2) kepanitiaan program penerima beasiswa sebagian besar terdiri dari staf full timer (non PNS) DBEP ADB, penempatan staf full timer dalam pengelolaan program memang baik terutama dalam hal mengerjakan hal-hal yang tidak terlalu prinsip seperti pengadministrasian dan komputerisasi data. Tetapi kalau untuk ikut mengambil kebijakan dan masuk menjadi tim seleksi, staf full timer bukanlah pada posisi yang tepat. 3) tanggung jawab pengelola program masih kurang karena dari pelaksanaan sampai kepada penyusunan laporan hasil semuanya diserahkan kepada staff full timer (Non PNS).

3) Pada Komponen Proses

Pada komponen proses yang terdiri dari: proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan program, proses evaluasi, proses akuntabilitas, keterbukaan, proses keberlanjutan (*sustainabilitas*), dan pengelolaan keuangan. Dijumpai bahwa dalam proses pengambilan keputusan masyarakat jarang dilibatkan, proses evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, sedangkan dalam proses pelaksanaan kegiatan jarang dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Kebiasaan seperti ini jarang akan menyelesaikan masalah, karena masalah yang terjadi pada saat proses pelaksanaan kegiatan tidak terdeteksi. Temuan kasus setelah selesai pekerjaan tidak bisa tuntas secara jelas.

4) Pada Komponen Produk

Pada komponen produk yang terdiri dari 1 (satu) aspek yaitu pemerataan dan perluasan akes pendidikan dasar, di mana di dalam program pemerataan pendidikan dasar yang ditekankan terjadinya penurun angka drop out (DO). Ditemukan bahwa jumlah siswa yang drop out (DO) sebelum program dilaksanakan (tahun 2006/2007) terdapat 591 orang siswa atau 0,44% siswa putus sekolah di bangku SD/MI dan 992 orang siswa atau 3,80% siswa putus sekolah dibangku SMP/MTs. Jumlah angka drop out (DO) di bangku SD/MI pada tahun

2007/2008 menurun menjadi 536 orang siswa atau 0,35% sedangkan di SMP/MTs angka drop out (DO) pada tahun 2007/2008 meningkat menjadi 1.505 orang atau 2,71%.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa angka putus sekolah setelah program dilaksanakan tidak mengalami penurunan yang signifikan terutama di SMP dan MTs. Artinya, banyak siswa yang diberikan beasiswa nilai atau hasil ujiannya tidak meningkat, bahkan ada yang mengulang kelas (Wanasaba), faktor ekonomi dalam hal ini menjadi alasan utama bagi mereka, bahkan masih ada orang tua (Sakra Barat) yang melarang anaknya bersekolah, Amak Nurhayati (dusun Batu Bokah, desa Suwangi kecamatan Sakra Barat)

Anggapan amak Nurhayati sebagaimana di atas, tidak bisa disalahkan seluruhnya, karena setelah diwawancarai lebih mendalam, jawaban tersebut didasarkan pada pengamatannya terhadap beberapa warga yang anaknya mengenyam sekolah tinggi (kasus Bp. Gunadi dan Bp. Zainuddin) di Sakra Barat, ternyata juga tidak bisa menjadi CPNS sebagaimana harapan orang tuanya, sekarang anaknya (Adi dan Eng) keduanya bekerja sebagai sopir dan buruh tani.

Sementara itu dari pendataan dinas P dan K kabupaten Lombok Timur ditemukan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mengalami peningkatan antara tahun 2006/2007 sampai dengan tahun 2007/2008. pada tahun 2006/2007 APK SD/MI/Paket A Setara mencapai 106,76% meningkat menjadi 107,98% pada tahun 2007/2008. Bila mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka masih ada kesenjangan 2,02% untuk mencapai 110%. Sedangkan APK SMP/MTs/Setara Paket B meningkat dari 77,38% pada tahun 2006/2007 menjadi 88,08% pada tahun 2007/2008. Bila mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka masih ada kesenjangan 1,92% untuk mencapai 90%.

Dalam pelaksanaan program di tingkat sekolah/siswa penerima beasiswa, terdapat beberapa temuan pokok yang dapat disampaikan dalam penelitian ini kaitannya dengan tingkat efektivitas program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out (DO) terutama miskin dan perempuan yaitu.

1) **Targeting** : Penemuan lapangan, antara lain: (i) kriteria untuk penentuan beasiswa cenderung lebih tertuju pada pengentasan kemiskinan daripada untuk menangani masalah pemerataan pendidikan dasar (walaupun hal ini mungkin tidak selalu jelek); (ii) kesulitan Komite Sekolah dalam menentukan calon penerima karena jumlah yang membutuhkan beasiswa jauh lebih banyak daripada jatah yang disediakan; (iii) meskipun alokasi beasiswa untuk tingkat SD sangat kurang, namun dijumpai ada penerima beasiswa yang tidak naik kelas dan kemudian putus sekolah, karena beasiswa diberikan kepada anak yang kurang berpotensi/berprestasi; (iv) dijumpai beberapa kasus (Kecamatan Sakra Barat

dan Labuhan Haji) beasiswa diberikan dengan cara dibagi kepada siswa lainnya demi pemerataan; (v) Ada bias dimasukkannya kriteria yang menyebabkan kuota beasiswa retrival tidak desa IDT, seimbang diantara daerah IDT dan non-IDT(terutama untuk tingkat SLTP); (vi) kriteria BKKBN untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga tidak selalu dapat digunakan; (vii) Tingkat kebutuhan dana untuk murid yang bersekolah di SLTP umumnya lebih besar dikelas 1 dan kelas 3 dibanding untuk kelas 2; demikian juga di kelas 1 dan kelas 6 SD dibandingkan kelas lainnya; (viii)alokasi beasiswa untuk tingkat SD dirasakan terlalu kecil, sementara kecenderungan angka putus sekolah semakin meningkat pada siswa diatas kelas 4, sehingga ada kemungkinan banyak siswa kehilangan kesempatan bersekolah karena telah putus sekolah sebelum mereka dapat melanjutkan ke SLTP; (ix) adanya ketentuan yang menetapkan bahwa beasiswa tidak dapat dialihkan kecuali hanya dalam kelas yang sama, telah menyebabkan proporsi penerimaan beasiswa antar kelas tidak seimbang, terutama bila jumlah alokasi beasiswa semakin mengecil; dan (x) tidak ada indikasi terjadi bias gender dalam pemberian beasiswa, karena pada sebagian besar kasus seleksi penerimaan beasiswa dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam juklak.

2) **Sosialisasi dan Transparansi Program**: Sosialisasi program beasiswa dianggap cukup memadai di hampir semua wilayah pengamatan, namun bagi masyarakat umum yang bukan target program dirasakan masih kurang. Sosialisasi dilakukan baik dengan cara: (i) mengundang orangtua murid pada waktu akan menerima dana beasiswa, (ii) hanya memberitahukan kepada siswa dan tidak kepada orangtuanya; (iii) sosialisasi melalui penayangan iklan layanan masyarakat tentang beasiswa melalui TV; ataupun (iv) mewajibkan anak untuk meminta surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa. Namun transparansi tentang penggunaan dana beasiswa retrival dinilai relatif sangat kurang transparan dihampir semua wilayah, bahkan diantara anggota Komite Sekolah dan guru-guru.
3) **Proses Pencairan Dana:** (i) Proses pencairan dana yang pada awalnya agak berbelit-belit karena adanya persyaratan administratif yang ketat, pada tahap berikutnya telah cukup efektif namun terdapat indikasi adanya pemotongan dana dibeberapa daerah; (ii) pencairan dana pada umumnya dilakukan dengan cara: (a) siswa bersama-sama dengan Kepala Sekolah dan seorang anggota Komite datang ke Kantor Dinas P dan K (bagian proyek desentralisasi pendidikan dasar-DBEP ADB), (b) secara kolektif melalui Kepala Sekolah, atau (c) Pengelola program datang ke sekolah (Masbagik); (iii) untuk beberapa daerah terisolir (seperti misalnya di Wanasaba), pengambilan dana dalam 3 tahap dirasakan cukup menyulitkan karena besarnya biaya transportasi, sehingga perlu ada

kebijakan khusus misalnya dapat dicairkan dalam 1-2 tahap saja; (iv) pencairan dana lewat buku tabungan tidak terlaksana, karena selain ketersediaan form Buku Tabungan BRI ditiap kantor cabang terbatas, dana hanya mengendap sebentar dan tidak menguntungkan pihak bank; (v) di beberapa daerah dijumpai dana dikelola oleh sekolah, dan siswa tidak dapat mengambil apabila membutuhkan karena dana beasiswa semuanya untuk biaya pendidikan siswa; walaupun cara ini mungkin baik, tetapi perlu kehati-hatian mengingat adanya kemungkinan siswa tidak berani mengambil dana beasiswa yang menjadi haknya kepada guru atau kepala sekolah, atau kemungkinan terjadinya penyimpangan.

4) **Penggunaan Dana:** Dana beasiswa biasanya digunakan untuk membeli buku dan alat-alat tulis, sebagian buku paket, pakaian seragam sekolah dan baju olahraga, dan sebagainya. Kecuali di beberapa kasus di mana uang beasiswa digunakan oleh orangtuanya, misal untuk membeli sembako, biaya melahirkan adiknya, dan sebagainya. Di semua sekolah lokasi penelitian, dijumpai satu kasus dimana dana beasiswa tidak diberikan langsung kepada siswa yang berhak, melainkan dikelola oleh sekolah dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan semua siswa yang hampir semuanya memang kurang mampu, seperti untuk membayar uang test sumatif, uang ujian, dan sebagainya agar semua siswa tetap dapat bersekolah. Di Masbagik dan Wanasaba dijumpai dana digunakan untuk membayar tunggakan iuran/sumbangan pendidikan dan iuran lain dari siswa-siswa lain yang kurang mampu yang bukan penerima beasiswa.
5) **Ketepatan Jumlah Alokasi dan Besarnya Beasiswa:** Besarnya dana beasiswa per siswa pada umumnya dirasakan cukup memadai dan dapat membantu program belajar siswa, tetapi untuk besarnya alokasi per sekolah, Khususnya SD, dinilai masih kurang. Walaupun demikian tingkat kecukupan beasiswa per murid antar kelas tidak sama, misalnya untuk anak kelas 6 SD serta kelas 1 dan 3 SLTP memerlukan biaya lebih besar, karena harus membayar uang pendaftaran, uang gedung, uang ujian, uang untuk mengambil ijazah, untuk perpisahan sekolah,dan sebagainya. Dalam beasiswa ini biasanya siswa tidak memperhitungkan untuk uang jajan atau biaya transportasi karena tetap menjadi tanggungan orangtuanya yang jumlahnya tidak selalu tetap.
6) **Peranan Komite Sekolah:** Efektivitas kerja komite dapat diukur antara lain dari: (i) ketepatan target penerima beasiswa; (ii) pelaksanaan rapat komite dan kegiatan sosialisasi program; (iii) pemanfaatan dana beasiswa dikalangan murid penerima beasiswa. Tingkat koordinasi, manajemen dan pengadministrasian program pada umumnya masih lemah. Komite Sekolah umumnya masih didominasi oleh Kepala Sekolah, dan penggunaan dana

beasiswa sangat tergantung dari peran Kepala Sekolah. Unsur masyarakat kurang dilibatkan dalam pelaksanaan program, dan unsur Komite Sekolah seringkali sudah dianggap mewakili unsur masyarakat. Tim MBS Kecamatan umumnya juga lebih didominasi oleh unsur Dikbud, dan peran kepala cabangnya hanya dalam pengajuan pengusulan ke Dinas P dan K, sedang anggota Tim MBS dan anggota Dewan Pendidikan maupun anggota tim steering committee lainnya juga kurang berperan. Aspek pengadministrasian program pada umumnya telah dilakukan cukup baik oleh Dinas P dan K, walaupun di tingkat sekolah tidak selalu demikian

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisia terhadap data penelitian dapat disimpulkan bahwa.

4.1.1 Efektivitas Implementasi Program

Pelaksanaan program pemerataan pendidikan dasar melalui pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out (DO) terutama miskin dan perempuan di Kabupaten Lombok Timur, ditinjau dari komponen konteks, input, proses dan produk termasuk ke dalam kategori efektif. Pada komponen konteks, nilai efektivitas yang diperoleh sebesar 3,83, nilai ini termasuk ke dalam kategori efektif. Nilai efektivitas komponen input diperoleh nilai sebesar 3,77 termasuk ke dalam kategori efektif. Sementara pada komponen proses nilai efektivitas yang diperoleh sebesar 3,80, nilai ini juga termasuk ke dalam kategori efektif. Begitu juga dengan komponen produk, nilai efektivitas yang diperoleh adalah sebesar 3,86 termasuk ke dalam kategori efektif.

Dengan demikian secara keseluruhan tingkat efektivitas implementasi program pemerataan pendidikan dasar melalui program pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out (DO) terutama miskin dan perempuan di Kabupaten Lombok Timur diperoleh nilai efektivitas sebesar 3,81 atau dapat dimasukkan ke dalam kategori efektif. Dalam artian bahwa kondisi program, perencanaan program, pelaksanaan program, hasil program, peran dan tanggung jawab pengelola program, warga sekolah/madrasah telah selesai/mendukung (berhasil dengan memuaskan) dengan sebagian kecil masih bisa ditingkatkan tetapi tidak mendesak.

4.1.2 Kelebihan dan Kelemahan Program

Terdapat beberapa kelebihan/ kekuatan dan kelemahan dalam implementasi program yaitu: 1) meningkatnya kepedulian orang tua, guru, dan masyarakat tentang pentingnya

pendidikan; 2) prosedur mudah dan jelas; 3) terdapat indikasi yang kuat bahwa program mengurangi jumlah DO, 4) kemungkinan adanya pemotongan atau penyelewengan dana dapat dikurangi.

Sedangkan kelemahan program antara lain: 1) terlalu banyak tim pelaksana, dari tim steering committee proyek DBEP-ADB, Dewan Pendidikan, Tim MBS Kabupaten, Tim Satuan Perencana Pendidikan (Satgas) kabupaten, Tim MBS kecamatan, kepala desa, hingga komite sekolah, tetapi tidak didukung oleh insentif dan biaya operasional, terutama untuk Tim MBS kecamatan, dan komite sekolah, sehingga peranannya kurang optimal; 2) dana beasiswa yang tersedia/dianggarkan tidak mencukupi kebutuhan, 3) dana beasiswa diberikan dalam jumlah yang seragam untuk setiap sekolah, tanpa mempertimbangkan jumlah murid, jauh dekatnya sekolah dengan tempat tinggal siswa, sehingga pembagiannya dirasakan kurang adil, baik antar sekolah maupun antar siswa; 4) Kemungkinan terjadinya tumpang tindih dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), dan Beasiswa Zakat (BAZISDA) dari pemerintah daerah; 5) peluang penyimpangan yang besar dalam penggunaan dana beasiswa karena lemahnya kontrol atau monitoring dan evaluasi dari pengelola program; 6) kurang mengakomodasai muatan lokal, yaitu perencanaan dan pelaksanaan secara partisipatif, 7) lemahnya sistem pemantauan dan kontrol di tingkat paling bawah walaupun telah mengikutsertakan wakil masyarakat dan orang tua murid.

4.1.3 Kendala yang Dihadapi

Terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, diantaranya.

1) Belum terjalinnya koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dalam hal pendataan pendidikan di kabupaten kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2) Pembagian kerja (*job description*) serta beban kerja pengelola program di dinas P dan K lebih banyak dibebankan kepada staf full timer (Non PNS) DBEP ADB.
3) Pihak sekolah enggan melakukan pendataan terhadap siswa putus sekolah yang belum pernah atau tidak pernah mengenyam pendidikan dengan alasan insentif tidak ada.
4) Tradisi kawin lari dan kawin diusia muda (*merari'*) serta tingginya tingkat perceraian menjadi hambatan yang paling dominan dalam penyelenggaraan program.
5) Siswa putus sekolah kebanyakan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri dan menjadi buruh (pekerja kasar) dalam negeri

4.1.4 Upaya Penanggulangan

Upaya pemerintah/pengelola program untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut diantaranya.

1) Dinas P dan K terutama pengelola program melakukan rapat-rapat koordinasi dengan berbagai instansi dan organisasi-organisasi pendukung penyelenggaraan pendidikan seperti: Dewan Pendidikan, Steering Committee, Tim MBS Kabupaten, Tim SATGAS Perencana Pendidikan kabupaten, Tim MBS Kecamatan dan Kepala Desa.
2) Pengelola program melakukan penyaringan secara ketat dengan menerapkan criteria-kriteria yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program serta menyusun daftar pembagian kerja (*job description*) bagi semua staf dan penanggungjawab program, dengan menambah ketentuan mengenai reward and funishment di dalamnya.
3) Pengelola program perlu mengupayakan adanya insentif bagi pihak sekolah dalam melakukan pendataan anak putus sekolah.
4) Pihak pengelola program dan pihak Dinas P dan K melakukan sosialisasi dan kampanye pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan, serta perlu adanya aturan pemerintah daerah yang mengatur kawin di usia dini (kawin muda) serta perceraian tentunya yang bersifat lebih spesifik.
5) Belum adanya upaya penanggulangan karena alasan ekonomi masyarakat yang masih belum stabil

4.2 Implikasi

Proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas merupakan sebuah tuntutan yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh seluruh komponen pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan visi dan misi pendidikan di kabupaten Lombok Timur. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan adalah sebuah lingkaran yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya antar komponen seperti: komponen konteks, input, proses dan produk, sebagaimana kajian yang dilakukan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini dengan demikian berimplikasi terhadap terjadinya perbaikan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah, dalam hal ini para pengelola program, baik di Dinas P dan K maupun pada tingkat sekolah/siswa penerima beasiswa. Hasil penelitian ini juga diharapkan berimplikasi terhadap perubahan pola pikir (*mainsett*) masyarakat pengguna layanan pendidikan dan dapat menumbuhkembangkan rasa kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Tanpa itu semua, proses penyelenggaraan pendidikan tidak akan mengalami perubahan yang signifikan, bahkan program pendidikan bisa menjadi hanya sekadar rutinitias untuk mencapai angka kredit dan kenaikan pangkat para pengelola pendidikan

4.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu direkomendasikan untuk diadakan perbaikan dalam pelaksanaan program pemerataan pendidikan dasar melalui pemberian beasiswa retrival kepada siswa rawan drop out (DO) terutama miskin dan perempuan, yaitu sebagai berikut.

1) Pengelola program. Agar terlaksana dan tercapainya tujuan program yang lebih optimal, sebaiknya untuk perekrutan pengelola program dilakukan dengan memberikan kriteria yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan program.
2) Kriteria Penerima Beasiswa. Mengingat adanya ketidak-tepatan sasaran dalam pemberian program beasiswa retrival, maka kriteria pemberian beasiswa perlu disempurnakan dengan cara:
   a. Menambah kriteria potensi atau prestasi murid untuk siswa SD/MI maupun SMP/MTs;
   b. Pada kasus jumlah jatah terlalu kecil, perlu kriteria akhir/final yang tidak akan menjadi perdebatan masyarakat dan mempermudah pihak sekolah terutama komite sekolah, misalnya angka NUAS/NUAN;
   c. Bagi masyarakat yang masih mempunyai tingkat kesadaran pendidikan rendah, diperlukan pernyataan tertulis dari orang tua murid untuk tetap menyekolahkan anaknya hingga tamat apabila memperoleh beasiswa;
   d. Menghilangkan sistem kuota penjatahan beasiswa untuk sekolah, diganti dengan sistem penjaringan murid dari bawah (*bottom up*); dan
   e. Sistem kuota hanya sebaiknya hanya digunakan untuk menetapkan jumlah beasiswa per tingkat sekolah.
3) Ketepatan program. Mengingat banyaknya program yang ditawarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan dana-dana bantuan pendidikan lainnya seperti beasiswa prestasi, beasiswa Indofoot, beasiswa supersemar, BKM, BOS, beasiswa dari DPS untuk sekolah yang mendapat bantuan DBEP-ADB, dan sebagainya. Maka besarnya beasiswa yang diberikan sebaiknya tidak perlu secara seragam dan dokumen penerima beasiswa yang sudah menerima beasiswa dari dana lainnya sebaiknya tidak diberikan rangkap.
4) Transparansi Program. Pentingnya peran kepala desa dan komite sekolah dalam pelaksanaan beasiswa. Kebiasaan menyerahkan pembuatan keputusan dan kontrol dana ke kepala sekolah perlu diubah. Para petugas dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Lombok Timur harus menggunakan semua kesempatan yang ada untuk

menekankan perlunya kepala sekolah menyelenggarakan diskusi terbuka dengan kepala desa dan anggota komite sekolah mengenai pelaksanaan program.

5) Masalah Pendataan. Sistem pendataan yang lebih akurat perlu ditingkatkan. Kepedulian aparat yang berwenang, seperti BPS, sekolah, BKKBN, BAPPEDA, Dinas P dan K atas data juga perlu ditingkatkan. Data agar secara nyata dimanfaatkan dalam rangka memantau perkembangan pelaksanaan program maupun dalam merencanakan pendidikan yang lebih bertanggungjawab.
6) Pemerataan dan Kesamaan Akses. Dalam upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang dapat memberikan pemerataan dan kesamaan akses dan hasil, maka adanya dualisme atau tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan program antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan departemen Agama perlu disederhanakan dan ditempatkan di bawah Dinas P dan K, sehigga tidak perlu lagi terjadinya perbedaan pelayanan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Hal ini akan semakin penting mengingat telah diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan. 1997. *Sangkaan Para Gender,* Yogayakarta, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

_____, 2003. *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan,* Yogyakarta, Tarawang Press.

_____, 2003. *Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial.* Jurnal Humaniora Volume XV, No.3.

Akhmadi, dkk. "Pengamatan Cepat SMERU tentang Permasalahan Pendidikan dan Program JPS, Beasiswa dan DBO di Empat Propinsi Kasus di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Lombok Timur" Laporan Khusus, Edisi Revisi, September 2003.

Agustina, Endah Trista. "Perempuan dan Pembangunan Perdamaian di Sulawesi Tengah dan Maluku" Juli 2004.

Ali & Gafar Ismail, 2005. *Akselerasi Pembangunan Potret Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten Lombok Timur,* Malang: The HQ Center.

Anam, Saipul. 2005. *Indra Djati Sidi Dari ITB Untuk Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: PT. Mizan Publika.

Arikunto Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoretis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ary, Donald, Lucy Cheser Jacobs & Asghar Razavieh. t.t. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Penterjemah Arief Furchan, Surabaya: Usaha Nasional.

Ayalon, Hanna. 2003. *Women and men go to university: mathematical background and gender differences in choice of field in higher education-1*. http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt= ”Hanna+Ayalon”

Barlas, Asma. 2002. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an.* Austen, University of Texas Press.

Berger, Peter L. 1991. *The Sacred of Canopy*, alih bahasa Hartono, cetakan ke dua, Jakarta, LP3ES.

Berger, Peter L. dan Luckmann Tomas. 1967. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Now York, Anchor Books.

Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklen, 2003. *Qualitative Research For Education An Introduction to Theories and Methods*, Fourth Edition, Boston: Pearson Education Group Inc.

Brannen, Julia. 2002. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan ke IV, Penerjemah Nuktah Arfawie Kurde, Imam Safe'I dan Noorhadi A.H., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Brinkerhoff, O. Robert. et all. 1986. *Program Evaluation A Practitioner's Guide For Trainers and Educators*. Massachussetts: Kluwer-Nijhoff Publishing.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Carnevale, Anthony P. 2001. *Investing in Human Capital - accountability in standards-based education.* http://www.findarticles.com/p/search? tb=art&qt= ”Anthony+P.+Carnevale”

Cleves Mosse, Julia. 1996. *Half the World, Half the Chance: An introduction to Gender and Development*, alih bahasa Hartian Silawati, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Creswell, Jhon W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. London: Sage Publications, Inc.

Darmaningtyas. 2004. *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press.

Depdikbud. 1998. *Panduan manajemen sekolah.* Jakarta: Dikmenum.

Depdiknas. 2001. *Laporan Penelitian Penyusunan Biaya Satuan Pendidikan SD, SLTP, SMU, dan SMK Negeri*. Jakarta: Depdiknas.

_____. 2002. *Manajemen Administrasi Proyek DBEP-ADB*. Jakarta: Depdiknas.

_____. 2002. *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.* Jakarta: Direktorat SLTP.

_____. 2003. *Indikator kinerja dewan pendidikan dan komite sekolah.* Jakarta : Proyek Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan.

Depdikbud Kab. Lombok Timur. 2004. *Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2004 – 2008.* Selong: Depdikbud.

Depdikbud Kab. Lombok Timur. 2002. *Rencana Strategik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2003 – 2007*. Selong: Depdikbud.

Durden, Garey & Larry Ellis. 2003. *Is class attendance a proxy variable for student motivation in economics classes? An empirical analysis*. http://www.findartcles.com/p/artcles/mi_m0IMR

Dy, Sideth S. & Akira Nomiya. 2003. *Basic Education in Cambodia: The Impact of UNESCO on Policies in the 1990s*. http://epaa.asu.edu/epaa/v11n48/.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk. 2002 *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Emarnas, 2007. "Kemiskinan Dan Harapan Pemberdayaan Masyarakat**".** WASPADA Online 29 Mar 07 02:01 WIB. http://www.waspada.co.id/ opini/artikel/artikel.php?article_id=87942

Enggineer, Asgar Ali, 2003. *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryanto, Yogyakarta, LKiS.

Fakih, Mansour, 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan INSIT Press.

_____, 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Fattah, Nanang & Mohammad Ali. (2003). *Materi pokok manajemen berbasis sekolah; 1-9; PGSD4408.* Jakarta: Universitas Terbuka

Faure, Edgar. et.al. 1972. *Belajar Untuk Hidup Dunia Pendidikan Hari Ini dan Hari Esok*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Fernandes, H.J.X. 1984. *Evaluation of Educational Programs*. Jakarta: National Education Planning, Evaluation and Curriculum Development.

Fraenkel, Jack R. and Norman E. Wallen. 1993. *How to Design and Evaluatif Research in Education*. Singapore: McGraw-Hill, Inc.

Freire, Paulo, Ivan Illich, Erich Fromm, dkk. 2006. *Menggugat Pendidikan Fundamentalis Konservatif Liberal Anarkis*, Cetakan ke VI, Penerjemah Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Giddens, Anthony, 1989. *Sociology,* Oxford, Polity Press.

Guilford, J.P. 1973. *Psichologycal Testing*. McGraw-Hill Book Company, Inc. New York.

_____, 1956. *Fundamental Statistics in Pshycology and Education*. McGraw-Hill Book Company, Inc. New York.

Hassan , Muhammad Kamal, 1987. *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim.* Alih bahasa Ahmadie Thaha, Jakarta, Lingkaran Studi Indonesia (LSI).

Hoesin, Iskandar. "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, DLL) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003.

Irawan, Ade. dkk. 2004. *Mendagangkan sekolah: studi kebijakan manajemen berbasis sekolah di DKI Jakarta*. Jakarta: ICW.

Isaac, Stephen & William B. Michael. 1971. *Handbook in Research and Evaluation A Collection of Principles, Methods, and Strategies in the Planning, Design, and Evaluation of Studies in Education and the Behavioral Sciences,* California: Robert R. Knapp Publisher.

Jalal, Fasli & Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Joint Committee. 1991. *Ukuran Baku Untuk Evaluasi Program, Proyek dan Materi Pendidikan*. Penerjemah Rasdi Ekosiswoyo. Semarang: IKIP Press.

Kompas. 2005. “"Merarik", Melaksanakan Adat Atau Penyingkiran Hak Perempuan?” Senin, 07 Pebruari 2005. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/07/swara/1542271.htm

Koyan, I Wayan. 2007. “Indikator Pemerataan Pendidikan” Makalah, disampaikan dalam acara perkualiahan pada Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali.

Makmun, “Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanggulangannya”, Kajian Ekonomi Keuangan, Vol. 7, No. 2. Juni 2003.

Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi. Malang: PPS IKIP Malang.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keduapuluh dua, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

McGuire, Meredith B. 1981 *Religion: The Social Context.* California, Wadsworth Publishing.

Organisasi Perburuhan Internasional, 2006. “Laporan Penelitian Isu-isu Perempuan dan Jender di Organisasi Serikat Pekerja/Buruh di Indonesia”, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional.

Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*, Penerjemah Budi Puspa Priyadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Popham, W. James. 1993. *Educational Evaluation*. Allyn Bacon. Boston

Powers, Jeanne M. 2004. *Increasing Equity and Increasing School Performance—Conflicting or Compatible Goals?*. California: http://epaa.asu.edu/epaa/v12n10/

Riduwan & Akdon, 2006. *Rumus dan Data Dalam Aplikasi Statistika Untuk Penelitian (Administrasi Pendidikan-Bisnis-Pemerintahan-Sosial- kebijakan-ekonomi-Hukum-Manajemen-Kesehatan)*. Alfabeta. Jakarta

Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Penterjemah Alimandan. Jakarta: Prenada Media.

Sahdan, Gregorius. 2005. “Menanggulangi Kemiskinan Desa”. Artikel - Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan - Maret 2005. http://ekonomirakyat.org/ edisi_22/artikel_6.htm

Skaalvik, Sidsel & Einar M. Skaalvik. 2004. *Gender differences in math and verbal self-concept, performance expectations, and motivation.* http://www.findartcles.com/p/search?tb=art&qt="Sidsel+Skaalvik"

Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Penerjemah Muhammad Shodiq & Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suara NTB, "Program Beasiswa Marak…Banyak Siswa Mengaku Miskin". http://www.suarantb.com/2004/07/16/Sosial/Detil_3.html

Sudijono, Anas. 2005. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sumodiningrat, Gunawan, 2002. *Sinkronisasi Program Penanggulangan kemiskinan*, Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM

Syukri, Erna Sofyan. 2003. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Laporan Penelitian, Denpasar: 14 – 18 Juli 2003.

Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Thomas, R. Murray, 2003. *Blending Qualitative and Quantitative Research Method in Theses and Dissertations*. California: Corwin Press, Inc.

Thorndike, Robert M. 1997. *Measurement And Evaluation in Psychology and Education*. Prentice-Hall, Inc. New Jersey.

Tilaar, H.A.R. 2004. *Paradigma baru pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Worthen, Blaine R., James R. Sanders & Jody L. Fitzpatrick. 1997. *Program Evaluation Alternative Approaches and Practical Guidelines*. Longman Publisher USA, New York.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional